

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak besar terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu perhatian serius dalam hal gizi di Indonesia adalah tingginya prevalensi stunting pada anak balita (Ramadhani *et al.*, 2019). Menurut WHO, sekitar 7,8 juta anak balita di Indonesia mengalami kondisi *stunting*. *Stunting* merujuk pada kondisi kurang gizi yang berkaitan dengan kekurangan nutrisi dan termasuk dalam kategori masalah gizi jangka panjang. Pengukuran *stunting* melibatkan evaluasi tinggi atau panjang tubuh balita, usia, dan jenis kelamin mereka (Sutarto *et al.*, 2018). *Stunting* merupakan permasalahan kesehatan berkelanjutan yang dapat dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, asupan makanan ibu selama kehamilan, kesehatan bayi, kekurangan konsumsi makanan bergizi, serta kurangnya perawatan yang memadai pada neonatus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *stunting* pada balita berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit dan kematian, serta menghambat perkembangan fisik, motorik, dan kognitif pada usia dini (Muhdar *et al.*, 2019).

Menurut informasi dari Pemantauan Status Gizi (PSG), Masalah gizi yang paling dominan di antara isu-isu gizi lainnya, seperti kekurangan gizi, kurus, dan obesitas, adalah angka kejadian stunting pada anak balita. Prevalensi stunting pada balita mengalami peningkatan dari 27,5% pada tahun 2016 menjadi 29,6% pada tahun 2017 (Kemenkes RI, 2018). Namun, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 menunjukkan tren yang berbeda, dengan angka prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 (Kemenkes, 2022).

Menurut informasi dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, sekitar 23% anak balita di Kabupaten Gresik tergolong dalam kategori *stunting*, jumlah ini hampir sebanding dengan angka *stunting* di Jawa Timur

secara keseluruhan, yakni sekitar 23,5%. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menentukan tiga belas desa sebagai daerah yang akan difokuskan untuk intervensi percepatan dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang terintegrasi (lokus *stunting*) pada tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Posisi pertama prevalensi terbanyak di kabupaten Gresik diduduki desa Tambakrejo dengan jumlah prevalensi 138 balita *stunting*.

Mengamati pertumbuhan anak secara dini melalui pemantauan pertumbuhan menjadi sangat penting, terutama pada bayi dan balita, dan ini dapat dijalankan melalui fasilitas pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu, sebagai elemen dalam sektor kesehatan yang bergantung pada partisipasi masyarakat, memegang peranan signifikan dalam mengawasi perkembangan anak dengan secara teratur melakukan pengukuran antropometri setiap bulan. Hasil dari pengukuran antropometri memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, terutama para ibu, mengenai status gizi dan perkembangan anak mereka. Data ini juga akan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan yang terpusat di puskesmas, dan informasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan kebijakan guna mengatasi isu gizi. Namun, upaya pemerintah untuk memperoleh data yang akurat dari pemantauan pertumbuhan di posyandu menghadapi kendala karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu dalam melakukan pengukuran antropometri (Fitriani & Purwaningtyas, 2020).

Pemahaman dan ketrampilan para kader posyandu dalam pengukuran antropometri bersignifikansi besar, sebab ini terhubung langsung dengan pertumbuhan balita. Kekurangan kompetensi pada pihak kader dapat berujung pada penafsiran status gizi yang keliru, sehingga mempengaruhi keputusan dan penanganan masalah secara tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi kemampuan para kader untuk diasah sedemikian rupa, melalui penyediaan pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan tugas yang mereka emban. Tujuannya yakni posyandu dapat dikelola secara efektif, memungkinkan mereka berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Hartono *et al.*, 2018).

Menurut penelitian (Megawati & Wiramihardja, 2019) masalah mendasar dalam posyandu adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para kader, dari segi akademis dan teknis. Oleh sebab itu, untuk menyediakan pelayanan optimal di posyandu, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjalankan kegiatan posyandu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria perkembangan yang telah ditetapkan. Data dari pretest menunjukkan bahwa hanya 20% dari kader yang memiliki pengetahuan yang kurang memadai. Namun, setelah mengikuti pelatihan, persentase ini mengalami penurunan menjadi 5%, sementara jumlah kader yang memiliki pengetahuan yang baik mengalami peningkatan menjadi 62%. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hasil pretest yang hanya mencapai 30%.

Menurut (Noya *et al.*, 2021) Seharusnya, para kader kesehatan di tingkat desa memiliki peran sentral dalam mengatasi isu-isu kesehatan. Mereka diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan, tetapi sayangnya, mereka seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan dalam tingkat pengetahuan kader (100%) dan juga perkembangan kemampuan semua kader (100%) setelah menjalani pelatihan. Menurut (Ramadhan *et al.*, 2021) para kader perlu diberikan pemahaman yang kuat tentang kesehatan, terutama dalam hal pencegahan *stunting*, agar mereka dapat memberikan penyuluhan dengan efektif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan dalam tingkat pengetahuan dari sebelum pendampingan, yang awalnya 61,9%, menjadi setelah pendampingan mencapai 94,9%.

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan kebiasaan kader pada saat melakukan penilaian status gizi yang tidak sesuai dengan SOP, tidak adanya pendampingan terhadap kader posyandu, dan tidak adanya pelatihan keterampilan pada kader posyandu. Maka dari itu peneliti mempunyai ide bahwa perlu dilakukan penelitian terkait “kemampuan melakukan pengukuran antropometri pada kader posyandu sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif di desa Tambakrejo, Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan kader sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan kader sebelum dan setelah dilakukan pendampingan intensif di desa Tambakrejo.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kader sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif.
- b. Untuk mengetahui tingkat keterampilan kader sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi peneliti yang masih baru dalam bidang ini, terutama terkait dengan tantangan kurangnya kemampuan, seperti pengetahuan dan keterampilan kader posyandu dalam mengevaluasi status gizi, terutama saat melakukan pengukuran antropometri.

2. Bagi Bidan Desa dan Kader

Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan para kader dalam melaksanakan pengukuran antropometri. Penelitian ini berpotensi menyumbangkan dampak positif dalam upaya mengatasi masalah, terutama terkait keterampilan yang kurang tepat dari kader posyandu dalam mengevaluasi status gizi. Hal ini juga dapat melibatkan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan efektivitas.

3. Bagi Program Studi Gizi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan jembatan bagi program studi gizi dalam pengembangan keilmuan khususnya gizi masyarakat. Selain itu, diharapkan hasil penelitian berikut bisa dijadikan panduan serta untuk meningkatkan pemahaman dalam ikut serta secara aktif dalam usaha pengendalian masalah, terutama terkait kurangnya keterampilan kader posyandu dalam menilai status gizi dengan tepat.

1.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian ini yaitu:

H₀: Tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan kader sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif.

H_a: Ada perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan kader sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan intensif.

